

**GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN OBJEK
WISATA PANTAI LUBUK DI DESA LUBUK KECAMATAN KUNDUR
KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019-2020**

Oleh: Syaiko Novrian

Email: syaiko.novrian2140@student.unri.ac.id

Pembimbing: Adlin

adlin@lecturer.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Tourism is one sector that has enormous potential to be developed and now tourism development is an integral part of national development, therefore it is necessary to do very good governance in tourism development or called Good Tourism Governance. In the development of Lubuk Beach, various developments have been carried out, but the development of Lubuk beach is still not going well because there are still several criteria that have not been implemented. The purpose of this study is to find out how the implementation of Good Tourism Governance in the development of Lubuk beach and what are the inhibiting factors of the development of Lubuk Beach.

This study uses the theory of Good Tourism Governance from Bambang Sunaryo, which is about the implementation of good tourism governance. The research method in this study uses a qualitative approach. The type of research used in this research is descriptive research. The research location is in Lubuk Village and several agency offices related to the development of Lubuk beach tourism objects. The types and sources of research data are divided into primary data with data collection techniques through interviews and secondary data in the form of supporting data related to the development of the Lubuk beach. The data collection techniques using interviews, documentation and observation as well as data analysis techniques in this study are qualitative descriptive. Research results from Good Tourism Governance in the Development of Lubuk Beach tourism objects in 2019-2020 have not gone well. This is because there are several criteria that have not been met in the application of Good Tourism Governance in the development of Lubuk Beach. In addition, there are also several inhibiting factors from the implementation of Good Tourism Governance in the development of Lubuk Beach, namely human resources, budget, land ownership and the Covid-19 pandemic

Keywords: *Good Tourism Governance, Tourism Development, Lubuk Beach, Tourism*

A. Pendahuluan

Dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan di sektor pariwisata, maka dalam prosesnya pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pada Pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwasanya kewenangan daerah dalam urusan pemerintahan pilihan salah satunya yaitu di sektor pariwisata (Indonesia, 2014). Selain pemerintah daerah yang memiliki kewenangan untuk dalam melaksanakan kewenangan daerah salah satunya di bidang Pariwisata, Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengembangan pembangunan didalam wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimilikinya termasuk pengembangan Pariwisata. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwasanya pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama dalam hal ini ialah berbagai potensi yang dimiliki desa salah satunya di bidang Pariwisata.

Dengan pariwisata menjadi sektor yang berpotensi dan bagian integral pembangunan nasional maka diperlukan tata kelola yang baik dalam pengembangannya yaitu *Good Tourism Governance*. *Good Tourism Governance* atau Tata Kelola Kepariwisata yang Baik merupakan konsep yang diadaptasi dari konsep *Good Governance* untuk melakukan pengelolaan di sektor pariwisata. Dalam penerapan *Good Tourism Governance* ini akan

berjalan dengan apabila adanya kerjasama para pemangku kepentingan dan keterlibatan partisipasi aktif yang sinergis antara pemerintah, swasta dan juga masyarakat setempat (Sunaryo, 2013). Dengan adanya Penyelenggaraan Kepariwisata ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan lapangan kerja (Wardana, 2020). Seperti yang ketahui Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki banyak sekali keindahan alam didalamnya. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki keindahan alam didalamnya yang memiliki potensi wisata yang bernilai salah satunya adalah di Kabupaten Karimun.

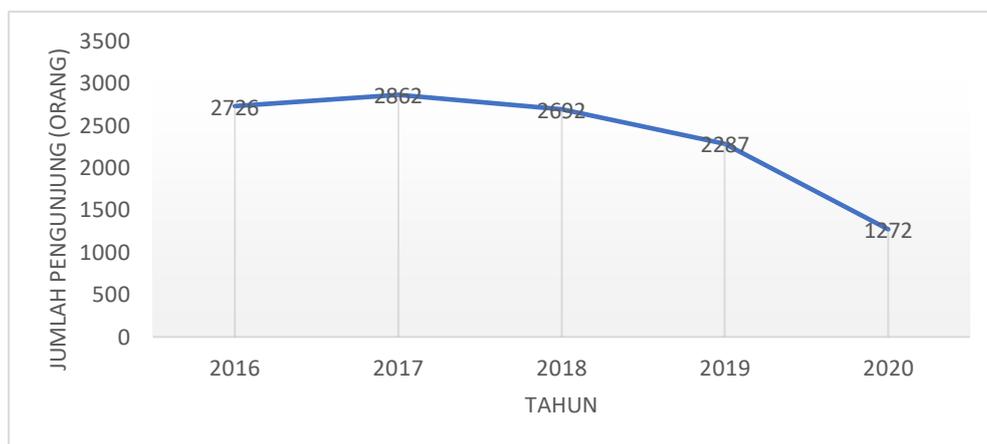
Kabupaten Karimun merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kondisi geografis yang berbentuk kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Dengan kondisi geografis yang berbentuk kepulauan, kabupaten Karimun dianugerahi berbagai macam keindahan didalamnya sehingga dapat dikembangkan sebagai objek wisata. Salah satu objek wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah objek wisata Pantai Lubuk. Pantai Lubuk sendiri merupakan salah satu pantai yang berada di Pulau Kundur tepatnya berada di desa Lubuk. Akses menuju lokasi wisata pantai Lubuk ini dapat menggunakan kendaraan bermotor dengan menempuh jarak 9,5 kilometer dari pusat kecamatan kundur yaitu Tanjungbatu. Jalan untuk menuju pantai Lubuk tersebut

pun juga sudah di aspal sehingga memberikan kemudahan dan juga keamanan bagi para pengunjung untuk mencapai lokasi wisata tersebut.

Kemudian fasilitas yang disedia di objek wisata tersebut juga sudah lengkap, seperti dengan banyaknya warung makanan yang berjualan disekitaran lokasi pantai, gazebo tempat para wisatawan menikmati makanan dan menikmati pemandangan serta juga terdapat pentas adat yang dapat digunakan oleh masyarakat setempat ataupun para wisatawan untuk mengadakan kegiatan. Selain itu juga tersedia lahan parkir yang luas bagi

kendaraan para pengunjung lokasi wisata pantai Lubuk tersebut, kemudian juga terdapat panggung rakyat yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan serta terdapat tugu dan gerbang sebagai penanda dan ikon pantai Lubuk.

Namun seiring waktu dengan kemudahan akses, adanya fasilitas dan banyaknya atraksi yang disediakan oleh objek wisata pantai Lubuk akan tetapi jumlah pengunjung wisata pantai Lubuk ini mengalami penurunan. Jumlah kedatangan para pengunjung yang berkunjung ke pantai Lubuk tiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Pemerintah Desa Lubuk

Dari jumlah pengunjung pantai Lubuk tiap tahunnya, dapat dilihat terjadi penurunan jumlah pengunjung yang berwisata ke pantai Lubuk. Untuk jumlah penurunan pengunjung wisata pantai Lubuk di tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 56%. Dengan penurunan jumlah pengunjung ini tentunya sangat berdampak pada pendapatan masyarakat yang berjualan disekitaran kawasan objek wisata pantai Lubuk tersebut. Penurunan jumlah pengunjung pantai Lubuk ini disebabkan seperti daya tarik wisata

yang masih seperti dahulu yang menimbulkan kebosanan dan menyebabkan banyak pengunjung yang mulai enggan berkunjung ke pantai Lubuk, selain itu sarana dan prasarana baru yang dapat menunjang kemudahan dan kenyamanan bagi para pengunjung, promosi area wisata yang masih belum mencapai berbagai pihak terutama masyarakat diluar wilayah kabupaten kundur terkhususnya masyarakat diluar pulau kundur serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam upaya pengembangan objek wisata guna meningkatkan

kembali jumlah pengunjung pantai Lubuk yang kemudian nantinya sangat berdampak pada pemasukan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Tourism Governance* dalam pengembangan objek wisata pantai lubuk dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Lubuk.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut (Moleong, 2012) Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian tentang bagaimana pelaksanaan *Good Tourism Governance* dalam pengembangan pantai Lubuk di desa Lubuk.

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu: Wawancara, Dokumentasi dan observasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini salah satunya adalah dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung antara peneliti dengan informan. Peneliti melakukan tanya jawab kepada informan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut

permasalahan penelitian ini. Sebagai pendukung dalam pengumpulan data melalui wawancara peneliti menggunakan alat seperti buku catatan, kamera serta rekaman saat melakukan wawancara. Dokumentasi adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dokumen yang relevan. Serta observasi yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Good Tourism Governance dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lubuk Di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 – 2020

Untuk mengkaji pengembangan objek wisata di Pantai Lubuk, peneliti menggunakan prinsip pengembangan wisata menurut Sunaryo (2013) yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat Terkait

Dalam upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di desa, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam arah pengembangan dan pembangunan di desa. Peranan dan Partisipasi masyarakat ditentukan dari bagaimana program dan upaya dari Pemerintah desa dalam merangkul masyarakat terutama dari bagaimana hubungan Kepala Desa dengan masyarakat desa sendiri. Hal ini sangat penting karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat ini pengembangan

dan pembangunan yang dilakukan di desa dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mengurangi tindakan penyelewengan yang dapat merugikan segala pihak.

Pengembangan wisata pantai Lubuk sangat didukung oleh masyarakat desa Lubuk. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana mana seluruh masyarakat yang berada diberbagai dusun di desa Lubuk sepakat dan mendukung untuk pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di desa difokuskan kepada pengembangan pariwisata di pantai Lubuk. Kemudian dari partisipasi masyarakat ini dapat dilihat dari berbagai bentuk ataupun kegiatan. Seperti masyarakat untuk ikut serta langsung sebagai panitia berbagai event pariwisata yang diselenggarakan, memberikan masukan dan saran dalam arah pengembangan pantai Lubuk, kemudian juga turut menjaga ketertiban dan keamanan dengan menerapkan pola hidup new normal demi memutus rantai penyebaran Covid-19 dan juga masyarakat yang langsung turut serta dalam gotong royong maupun pembangunan yang dilakukan di kawasan pantai Lubuk.

2. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Dalam upaya pengembangan dan pembangunan yang dilakukan di desa terutama di sektor pariwisata, sangat penting peranan setiap pemangku kepentingan didalamnya baik itu pemerintah desa, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat dengan berbagai kemampuan yang dimiliki masing-masing pihak. Pengembangan pariwisata

merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan yang mana menyesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah. Dalam pengembangan pariwisata dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yaitu Dinas Pariwisata. Namun tetap, dalam pembangunan dan pengembangan yang dilakukan di desa peranan pemerintah desa masih sangat penting dan dominan, hal ini dikarenakan pemerintah desa memiliki kewenangan dan juga kewajiban dalam melaksanakan pengembangan dan pembangunan di wilayah desanya guna memberikan kemanfaatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan bekerjasama dengan masyarakat serta pihak swasta. Dengan adanya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan ini, dapat memberikan masukan dan saran dengan berbagai perspektif yang dimiliki oleh masing-masing pihak bagi arah tindakan untuk mendukung pengembangan di desa terutama dalam pengembangan di objek wisata pantai Lubuk pantai Lubuk.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam pengembangan pantai Lubuk ini dilakukan dengan melaksanakan koordinasi, pengawasan, pelatihan, pembinaan dan pemberian kemudahan bagi berbagai pihak untuk melakukan usaha di kawasan pariwisata dengan memberikan rekomendasi izin usaha serta melaksanakan event-event pariwisata yang berguna untuk memberikan pemasukan bagi masyarakat dan swasta dari pengunjung yang datang ke Pantai Lubuk.

Pihak swasta memiliki andil dalam pengembangan pantai Lubuk yang mana dalam hal ini turut dalam perencanaan. Selain itu juga pihak swasta juga melakukan pengembangan dan pembangunan infrastruktur sendiri namun masih hanya dilakukan dikawasan mereka sendiri belum dilakukan untuk secara umum dikawasan pantai Lubuk. Selain itu, masyarakat juga memiliki keterlibatan dalam pengembangan pantai Lubuk ini. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pantai Lubuk ini bertujuan untuk membantu percepatan pengembangan pantai Lubuk, membantu menyalurkan arah pengembangan pantai Lubuk sesuai nilai-nilai kehidupan masyarakat desa serta meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.

3. Kemitraan Kepemilikan Lokal

Dalam upaya pengembangan dilokasi objek wisata sangatlah penting diperhatikan bahwasanya harus ada perbaikan kualitas lapangan pekerjaan atau fasilitas penunjang usaha yang mana nantinya berdampak pada perbaikan ekonomi masyarakat di desa sehingga nantinya berpengaruh kepada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang mana dalam hal ini Pemerintah Desa sangat memiliki andil besar untuk memperhatikan hal tersebut bersama dengan pemiiik lokal maupun swasta.

Kemitraan kepemilikan lokal dalam pengembangan pantai Lubuk ini belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan pengembangan dan pemeliharaan fasilitas penunjang pariwisata yang

ada di pantai Lubuk seperti restoran, gazebo, dan juga spot foto hanya dilakukan oleh pemilik swasta belum ada model kemitraan yang sinergis. Upaya kemitraan yang dilakukan hanya sebatas penyampaian saran dan juga masukan kepada para pemilik lokal yang ada dikawasan pantai Lubuk.

4. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut

Dalam pengembangan pariwisata, sumber daya alam menjadi faktor penting dalam pariwisata sebagai daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Sebagai daya tarik utama, maka perlu di perhatikan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Untuk itu, pemerintah desa memiliki peranan utama dalam pengelolaan pemanfaatan sumber daya alam terutama memperhatikan sumber daya alam yang sulit diperbarui. Selain itu juga perlu adanya kerjasama dengan pihak swasta dan juga masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan pariwisata.

Pengembangan pantai Lubuk ini sangat memperhatikan keindahan alam yang dimilikinya, dimana dalam keindahan alam yang dimiliki dipantai Lubuk ini hanya bisa dimanfaatkan tanpa harus diubah maupun dirusak keasliannya. Hal ini dapat dilihat pada pemanfaatan batuan yang ada di pantai Lubuk yang dijadikan spot foto dengan nama Pulau Cinta maupun pasir putih yang berada disepanjang pantai Lubuk.

Pemanfaatan sumber daya alam di pantai Lubuk sudah diperhatikan, namun masih belum dapat berjalan dengan maksimal

karena kepemilikan lahan yang berada dipantai Lubuk ini masih dimiliki oleh pribadi yang mana sudah dimanfaatkan dan dikelola menjadi tempat usaha bagi mereka sendiri. Selain itu juga kepemilikan lahan yang mana dimiliki oleh masyarakat diluar desa Lubuk menjadi penghambat pengembangan pantai Lubuk ini karena sulitnya mengadakan pembicaraan dan juga persetujuan mengenai pengelolaan lahan yang dimilikinya untuk dikembangkan untuk menambah fasilitas dan kualitas pariwisata yang berada di pantai Lubuk.

5. Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat

Pengembangan dan pembangunan di pantai Lubuk ini sudah dilakukan sesuai dengan masukan dari masyarakat dan juga swasta yang ada di pantai Lubuk, pengembangan yang berdasarkan masukan masyarakat dan swasta ini diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan juga nilai kehidupan yang ada di masyarakat desa Lubuk, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke pantai Lubuk. Aspirasi masyarakat dalam pengembangan pantai Lubuk selain untuk meningkat jumlah pengunjung juga menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dan swasta yang ada di pantai Lubuk. Masukan dari masyarakat dapat dilihat dari pengembangan atraksi atau daya tarik wisata budaya yang berdasarkan dari masyarakat desa Lubuk yaitu daya tarik wisata budaya tari hedung yang berasal dari suku flores dan juga kesenian

pencak silat yang berasal dari suku melayu.

6. Daya Dukung Lingkungan

Pantai Lubuk sudah dianugerahi berbagai ragam keindahan alam, yaitu pasir putih sepanjang 2 kilometer. Selain itu juga adanya batuan alami yang menjadi ciri khas dari keindahan yang dimiliki oleh pantai Lubuk dan juga keindahan sunset yang dimiliki oleh pantai Lubuk yang di sajikan setiap sorenya. Selain keunggulan alam, daya dukung lingkungan dalam pengembangan pantai Lubuk ini juga di dukung oleh keadaan sosial masyarakat desa Lubuk.

Masyarakat desa Lubuk sangat mendukung pengembangan yang dilakukan di pantai Lubuk baik melalui masukan dan saran. Selain itu juga masyarakat desa Lubuk turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan baik itu gotong royong, sebagai panitia event pantai dan lainnya. Kemudian daya dukung lingkungan dalam wisata pantai Lubuk ini juga didukung oleh aspek kebudayaan masyarakat asli desa Lubuk.

7. Monitor dan Evaluasi Program

Monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata wajib dilakukan agar pengembangan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi dan juga memaksimalkan kembali pengembangan yang telah dilakukan dengan memperbaiki kekurangan yang terjadi sebelumnya. Pemerintah Desa Lubuk memiliki peranan dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan dalam pengembangan wisata, namun pemerintah desa

memerlukan perbaikan-perbaikan terutama dari masyarakat dan swasta dalam perbaikan proses pengembangan wisata.

Selain Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun juga memiliki peranan dalam upaya monitoring program-program yang dilakukan dalam pengembangan wisata agar sesuai dengan rencana yang Dinas Pariwisata yang telah dibentuk sebelumnya. Kemudian DPRD Kabupaten Karimun yang memiliki tugas sebagai pengawasan juga mengadakan pengawasan terhadap berbagai upaya pengembangan wisata yang diselenggarakan agar tidak ada terjadinya penyalahgunaan yang dapat merugikan berbagai pihak dalam pengembangan wisata pantai Lubuk

8. Akuntabilitas Lingkungan

Akuntabilitas lingkungan dalam pengembangan pantai Lubuk ini bertujuan untuk meningkatkan pemasukan bagi masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat desa Lubuk. Hal ini dapat dilihat dengan dari berbagai program pembangunan di pantai Lubuk ini para pekerjanya ialah masyarakat desa Lubuk terutama yang terdampak PHK di Malaysia akibat dari kondisi Pandemi Covid-19. Selain dengan memanfaatkan masyarakat dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan di pantai Lubuk, juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pengembangan di pantai Lubuk.

Pertanggungjawaban dalam pengembangan pantai Lubuk ini bertujuan memperbaiki taraf hidup kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dengan

bagaimana dilaksanakannya pemberdayaan kepada kelompok masyarakat yang ada di desa Lubuk ini. Salah satu pemberdayaan yang dilaksanakan ialah dengan produksi produk asli masyarakat desa Lubuk yaitu keripik singkong dan keripik emping yang mana produk asli ini dapat dijual dikawasan wisata pantai Lubuk dan menjadi sumber masukan bagi masyarakat desa Lubuk. Selain akuntabilitas untuk masyarakat, juga dilakukan pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di Pantai Lubuk ini terutama sumber daya alam yang sulit untuk diperbarui.

Pemanfaatan sumberdaya alam memperhatikan keaslian sumber daya alam yang ada dikawasan pantai Lubuk ini. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam di pantai Lubuk ini dilarang untuk dimanfaatkan secara berlebihan dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada dikawasan pantai Lubuk ini hanya boleh untuk diperindah dan tidak boleh diubah keasliannya apalagi sampai harus dirusak sumber daya alam yang ada di pantai Lubuk ini.

9. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun telah menyelenggarakan pelatihan dalam mendukung pengembangan pariwisata dengan menasar kepada masyarakat desa, kelompok pengelola swasta dan juga kelompok sadar wisata. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata sendiri ialah sosialisasi dan pelatihan penerapan Sapta

Pesona Wisata. Sapta Pesona Wisata merupakan konsep dari penyelenggaraan pariwisata di Indonesia dengan memberdayakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suasana kondusif serta meningkatkan kualitas pariwisata.

Selain pelatihan mengenai Sapta Pesona Wisata kepada masyarakat, pengelola swasta dan juga kelompok sadar wisata. Dinas Pariwisata juga menyelenggarakan pelatihan lainnya berkaitan dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Karimun, yaitu pelatihan Pemandu Wisata bagi masyarakat. Selain pelatihan mengenai Pemandu Wisata, ada beberapa pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun dalam pengembangan wisata yang berada di kawasan Kabupaten Karimun, yaitu:

Tabel 3. 1 Program Pelatihan Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun

No	Bentuk Pelatihan
1	Pelatihan Sadar Wisata
2	Pelatihan Usaha Kepariwisata
3	Pelatihan Strategi Promosi

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat, kelompok swasta dan juga kelompok sadar wisata dalam menyelenggarakan pariwisata berjalan dengan kondusif, aman, nyaman dan sebagainya sehingga kedepannya dapat menimbulkan

rasa kepada wisatawan untuk berkunjung kembali ke kawasan pariwisata terkhususnya ke pantai Lubuk. Selain pelatihan mengenai Pengetahuan tentang pengelolaan swasta, dari Pemerintah Desa Lubuk sendiri juga melaksanakan pelatihan bagi masyarakat desa terutama dalam memproduksi produk asli dari desa Lubuk yang dapat menjadi makanan khas dari wisata Pantai Lubuk.

10. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Dalam melakukan promosi pariwisata pantai Lubuk sudah dilakukan. Dari pihak desa sendiri sudah melaksanakan promosi tersebut dengan memanfaatkan sosial media facebook yang mana cakupannya masih luas. Selain itu, promosi mengenai pariwisata pantai Lubuk ini juga dilakukan oleh masyarakat, swasta dan juga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karimun. Dinas pariwisata dan Kebudayaan kabupaten karimun telah melaksanakan promosi-promosi pariwisata yang ada di kawasan kabupaten karimun dengan memanfaatkan media sosial yang ada seperti instagram dan juga youtube dengan nama "karimuntourism". Selain itu dalam promosi wisata, Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun juga melakukan kerjasama dengan media lokal yaitu BatamTV untuk meliput dan mendokumentasikan landmark dari pantai Lubuk agar dapat dipromosikan lebih luas lagi. Selain itu, promosi pantai Lubuk dilakukan dengan mendaftarkan pariwisata pantai Lubuk ini ke situs Desa Wisata Nusantara yang mana cakupannya skala nasional seluruh

Indonesia. Dengan didaftarkan ke situs Desa Wisata Nusantara ini, pantai Lubuk dapat lebih diketahui dan dikenal oleh masyarakat luas seluruh Indonesia sehingga dapat menarik lebih banyak lagi wisatawan untuk dapat berkunjung ke pantai Lubuk. Namun tentunya dengan promosi yang hanya dilakukan dengan memanfaatkan media sosial memiliki keterbatasan terutama dalam cakupan luas informasi yang di dapati oleh masyarakat, yang mana cakupannya hanya masyarakat sekitran kabupaten karimun belum menysasar ke masyarakat yang lebih luas.

Advokasi nilai kebudayaan dalam pengembangan pantai Lubuk telah secara baik

hal ini terlihat dengan adanya pemberdayaan kesenian asli masyarakat desa Lubuk yang beragam yaitu kesenian dari suku flores dan juga melayu dapat merepresentasikan karakter dan juga identitas asli masyarakat desa Lubuk yang beragam dan juga mentoleransi berbagai perbedaan yang ada dalam mendukung pengembangan wisata di pantai Lubuk.

b. Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Objek Wisata Pantai Lubuk

Berdasarkan hasil analisis mengenai pembahasan tentang *Good Tourism Governance* dalam pengembangan objek wisata pantai Lubuk di desa Lubuk kecamatan kundur kabupaten Karimun provinsi kepulauan Riau tahun 2019-2020 terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat. Adapun faktor faktor penghambat ialah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pengembangan wisata maka perlu dilakukan berbagai kegiatan dan juga pendidikan bagi masyarakat mengenai kepariwisataan, salah satunya dengan pelatihan. Pelatihan disini selain mengenai kepariwisataan juga dilakukan berbagai pengembangan tentang bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan sumberdaya alam dan atraksi yang dapat menarik lebih banyak wisatawan.

Kualitas Sumber daya manusia di desa Lubuk masih sangat perlu ditingkatkan dengan berbagai bentuk pengembangan. Sumber daya manusia yang berada dikawasan pantai Lubuk ini masih belum memiliki pengetahuan serta kemampuan untuk menggali lebih jauh mengenai potensi yang dimiliki di kawasan pantai Lubuk ini. Sehingga masih sulit dilakukan pengembangan di pantai Lubuk.. Selain meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menggali potensi di kawasan pantai Lubuk, juga perlu diperhatikan peningkatan dalam atraksi guna menarik lebih banyak pengunjung. Masih minimnya pengembangan atraksi dan event yang dapat menarik lebih banyak wisatawan untuk dapat berkunjung ke pantai Lubuk.

2. Anggaran

Dalam mewujudkan kesuksesan pengembangan pariwisata di pantai Lubuk, anggaran pengembangan didasari pada anggaran Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dijadikan

sumber pembelanjaan dan pembiayaan dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata pantai Lubuk. Namun dalam pengembangannya pantai Lubuk ini pengembangannya belum diarahkan kepada pengembangan kearah pemberdayaan UMKM bagi masyarakat dan juga untuk swasta yang berada di kawasan pantai Lubuk.

Penggunaan anggaran dalam pengembangan dan pembangunan di kawasan pantai Lubuk ini masih fokuskan kepada upaya pembangunan fisik seperti fasilitas dan juga tempat-tempat yang menjadi ciri khas dari pantai Lubuk ini, sehingga pengembangan yang difokuskan kepada upaya pengembangan UMKM dengan bentuk bantuan modal dan juga bantuan fisik belum dapat dilaksanakan. Selain penggunaan anggaran yang belum difokuskan kepada bantuan modal untuk pengembangan UMKM, penggunaan anggaran dalam pengembangan objek wisata pantai Lubuk ini juga dialihkan ke penanggulangan covid-19 yang melanda seluruh dunia sehingga berdampak pada keselamatan hidup masyarakat terutama di desa Lubuk.

Pengembangan pantai Lubuk sendiri terjadi hambatan dalam penggunaan dana yang menjadi sumber dilaksanakannya pengembangan dan juga pembangunan yang dilakukan di pantai Lubuk dikarenakan disituasi pandemi covid-19 yang melanda maka penggunaan anggaran yang dimiliki desa diutamakan pada penanggulangan covid-19 seperti dengan bantuan BLT, ketahanan pangan dan juga pencegahan

penularan covid-19 di desa Lubuk sehingga terjadi perlambatan pengembangan pariwisata di pantai Lubuk.

3. Kepemilikan Lahan

Penggunaan anggaran dalam pengembangan dan pembangunan di kawasan pantai Lubuk ini masih fokuskan kepada upaya pembangunan fisik seperti fasilitas dan juga tempat-tempat yang menjadi ciri khas dari pantai Lubuk ini, sehingga pengembangan yang difokuskan kepada upaya pengembangan UMKM dengan bentuk bantuan modal dan juga bantuan fisik belum dapat dilaksanakan. Selain penggunaan anggaran yang belum difokuskan kepada bantuan modal untuk pengembangan UMKM, penggunaan anggaran dalam pengembangan objek wisata pantai Lubuk ini juga dialihkan ke penanggulangan covid-19 yang melanda seluruh dunia sehingga berdampak pada keselamatan hidup masyarakat terutama di desa Lubuk.

pengembangan pantai Lubuk sendiri terjadi hambatan dalam penggunaan dana yang menjadi sumber dilaksanakannya pengembangan dan juga pembangunan yang dilakukan di pantai Lubuk dikarenakan disituasi pandemi covid-19 yang melanda maka penggunaan anggaran yang dimiliki desa diutamakan pada penanggulangan covid-19 seperti dengan bantuan BLT, ketahanan pangan dan juga pencegahan penularan covid-19 di desa Lubuk sehingga terjadi perlambatan pengembangan pariwisata di pantai Lubuk.

4. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 mulai melanda seluruh dunia sejak akhir tahun 2019. Seluruh dunia terjangkit wabah virus ini tidak terkecuali di Indonesia. Covid-19 mulai masuk di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pandemi Covid-19 yang menyebar keseluruh wilayah Indonesia berdampak pada berbagai perubahan perilaku kehidupan manusia sehingga kesehatan menjadi faktor utama yang sangat diperhatikan agar mencegah lebih luasnya masyarakat yang terjangkit virus covid-19 ini. Dengan mewabahnya virus covid-19 ini tentunya berpengaruh juga dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang berfokus pada sektor kesehatan.

Terjadi perubahan anggaran yang mana difokus dengan berbagai macam kebutuhan terutama dalam pengembangan dan pembangunan yang dilaksanakan diubah untuk difokuskan kepada upaya pencegahan dan juga penanggulangan Covid-19 agar tidak menimbulkan korban yang banyak disisi masyarakat. selain berdampak pada penggunaan anggaran, dampak dari Covid-19 ini juga berdampak pada kinerja dalam pengembangan pariwisata pantai Lubuk ini. Dengan upaya pencegahan penularan covid-19 yang ada di desa Lubuk ini tentunya berdampak pada kinerja pemerintah desa serta aktivitas-aktivitas masyarakat desa Lubuk. hal terjadi karena diberlakukannya pembatasan-pembatasan kegiatan sosial guna memutus rantai penyebaran covid-19.

D. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil pembahasan dan penelitian, maka peneliti mencoba

untuk dapat menarik kesimpulan dari penelitian Good Tourism Governance dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Lubuk di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019-2020. Adapun kesimpulannya ialah Upaya pengembangan pantai Lubuk belum berjalan optimal, dari sepuluh indikator Good Tourism Governance telah terlaksana Delapan indikator. Partisipasi masyarakat, keterlibatan segenap pemangku kepentingan, akomodasi aspirasi masyarakat, daya dukung lingkungan, monitoring dan evaluasi program, akuntabilitas lingkungan dapat dilihat bagaimana mengutamakan kesejahteraan masyarakat desa Lubuk serta pengawasan dalam pemanfaatan kekayaan alam yang ada di pantai Lubuk secara baik. Pelatihan Kepada Masyarakat serta Promosi dan Advokasi nilai Kebudayaan sudah berjalan dengan baik. Kemitraan pemilik lokal dan pemanfaatan sumber daya secara berlanjut belum dapat berjalan dengan baik karena masih banyaknya hambatan-hambatan dalam pengembangan pantai Lubuk. Adapun Faktor-faktor penghambat dari pengembangan objek wisata pantai Lubuk ini adalah sumber daya manusia, anggaran, kepemilikan lahan serta pandemi Covid-19.

Dalam Pengembangan Lubuk Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun membentuk model kemitraan dengan pemilik lokal agar usaha penunjang pariwisata yang dimiliki swasta diperbarui dan ditingkatkan kualitasnya, melaksanakan pelatihan dan pemberdayaan

dilakukan dengan pelatihan mengenai pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi ciri khas dari masyarakat desa Lubuk dan memasang baliho dikawasan yang padat penduduk seperti di pulau Batam dan Tanjungpinang untuk memperkenalkan Pantai Lubuk dan juga menarik lebih banyak wisatawan berkunjung ke Pantai Lubuk Kemudian Pemerintah Desa Lubuk meningkatkan komunikasi dan strategi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di kawasan pantai Lubuk yang masuk di lahan milik pribadi sehingga pemanfaatan sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kemudian Pemerintah Desa, Pelaku Swasta dan juga Masyarakat dapat membantu pengunjung untuk mengakomodasi masukan dan sarannya dengan membuat Kotak Masukan dan Saran di kawasan pantai Lubuk agar dapat dijadikan sudut pandang lain untuk perbaikan dan juga upaya pengembangan Pantai Lubuk Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun dalam Pemerintah Desa dan Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun sebaiknya.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Fauzan, D. G. & A. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Widodo, J. (2001). *Good Governance: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Intan Cendekia
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi*

Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.

- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 13(2), 177–181.
- Usman, H., & Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarsono, B. (2017). Memahami Dokumentasi. *Acarya Pustaka*, 3(1), 47.
<https://doi.org/10.23887/ap.v3i1.12735>

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

Jurnal

- Dedy Wahyu Hernanda, L. I. (2018). Community Empowerment Based on Good Tourism Governance in the Development of Tourism Destination (Case Study of Kawah Ijen Tourism Buffer Zone “Kampung Kopi”

- Gombengsari Village, Kalipuro District, Banyuwangi Regency). *Journal Indonesia Tour Development Study*.
- Galih W. Pradana, A. Z. (2021). Tourism Village Management Requires *Good Tourism Governance*: Study in the Kampung Lampion Code 18 Yogyakarta Area. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*
- Lely Indah Mindarti, M. F. (2019). Three Pillars Partnership in The Tourism Destinations Management in Order to Actualize Good Tourism Governance (Study on a Rafting Tour in Probolinggo Regency). *Journal Indonesia Tour Development Study*.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sutiarso, M. A. (2018). Pengembangan Pariwisata yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. *OSF Preprint, September*, 1–11
- Wahyuni, R. T., & Nawangsari, E. R. (2021). Development of Kampung Wisata Lawas Maspati Surabaya As Tourism Heritage in Good Tourism Governance Perspective. *DIA: Jurnal Administrasi ...19(2)*. <http://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/dia/article/view/5581>
- Skripsi**
- Firdaus, E. (2021). *Tata Kelola Pariwisata Kepulauan Banyak Kabupaten Aceh Singkil*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Hidayati, N. (2018). *Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar di Kabupaten Boyolali Dalam Perspektif Good Tourism Governance*. Universitas Brawijaya.
- Wahyuningsih, S. (2018). *Strategi Pengembangan Objek Wisata Pantai Apparalang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Kabupaten Bulukumba*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Wardana, A. (2020). *Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Beautiful Malino di Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.